

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP: Korupsi, Money Laundering, & Trafficking*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Bambang Waluyo, 2022, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bentham, Jeremy, 2000, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Kitchener, Ontario: Batoche Books.
- Boy Nurdin, 2021, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Budi Juliardi, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Padang: Gita Lentera.
- Djulaeka, dan Devi Rahayu, 2020, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Scopindo Media Pustaka.
- Elwi Danil, 2021, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Evi Hartanti, 2023, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Agus Kasiyanto, 2018, *Tindak Pidana Korupsi: Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Prenada Media.
- H. Iwan Rasiwan, 2025, *Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Grafindo Publisher.
- Hasbullah F. Sjawie, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tipikor*, Jakarta: Prenada Media.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media.
- Masidin, 2023, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*, Jakarta: Prenada Media.
- Mia Amalia, 2025, *Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, dan Kasus*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Muhammad Ramdhan, 2021, *Metode Penelitian*, Jakarta: Cipta Media Nusantara.
- Muhamad Zainul Arifin, 2024, *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi Dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum Dan Praktik)*, Jakarta: Publica Indonesia Utama.

Muhamad Zainul Arifin, 2024, *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum dan Praktik)*, Jakarta: Publica Indonesia Utama.

Monang Siahaan, 2013, *Korupsi: Penyakit Sosial Yang Mematikan*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

Risqi Perdana Putra, 2021, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Deepublish.

Rahardjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Taufik Firmanto, 2024, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau

dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

C. Jurnal dan Skripsi

Adik Bismara. 2022. "Penerapan Undang-Undang Korupsi Terhadap Pelaku Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Bagi Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)." *Skripsi*, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. <https://erepository.uwks.ac.id/11800/>

Ahmad Rustan Syamsuddin. 2020. "Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa." *Jambura Law Review*, Vol. 2, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5942>

Andi Bau Mallarangeng, dan Ismail Ali. 2023. "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Legal Journal of Law*, Vol. 2, No. 2. <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/69>

Dewi Asri Puanandini, Vita Suci Maharani, dan Putri Anasela. 2025. "Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 4, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1173>

Dhea Aulia M. Purba, Hendri Jayadi Pandiangan, and Djernih Sitanggang. 2024. "Analisis Yuridis Pengurangan Pidana bagi Terdakwa Perempuan pada Kasus Korupsi di Setiap Tingkatan Pengadilan." *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 3, No. 3. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2764>

Diah Turis Kaemirawati, dan Bayu Hidayah. 2025. "Pengaruh Vonis Bebas Ronald Tannur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Kepercayaan Publik." *Binamulia Hukum*, Vol. 14, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.941>

- Harry Harmono. 2024. "Problematika Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.939>
- I Sukanada. 2021. "Hakikat Prinsip Imparsialitas Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Skripsi*, Universitas Hasanuddin. <https://repository.unhas.ac.id/view/divisions/ilmu=5Fhukum/2021.html>
- Inka Sisilia Putri, Fitri Wahyuni, dan Siti Rahmah. 2022. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Putusan Perkara Nomor: 13/Pid. Sus/2020/PN Tbh)." *Jurnal Riset Indragiri*, Vol. 1, No. 2. <https://scholar.archive.org/work/zf4njptk5rg7tfw44nmcnjghja/>
- Jerry Indrawan, Anwar Ilmar, dan Hermina Simanihuruk. 2020. "Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintah Daerah." *Jurnal Transformative*, Vol. 6, No. 2. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.02.1>
- Jerman Pohan. 2023. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Lepas Dari Segala Tuntutan Hukuman Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1169 K/Pid. Sus/2019)." *Skripsi*, Universitas Islam Sumatera Utara. <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2677>
- Johannes Sinaga. 2017. "Pembingkai Kasus Korupsi Dana Bansos Sumatera Utara Oleh Sekjen Partai Nasdem Di Pemberitaan Metro Tv Dan Tv One (Analisis Framing Robert N. Entman, Edisi 15 Oktober-24 Oktober 2015)." *Skripsi*, Universitas Mercu Buana Jakarta. <https://repository.mercubuana.ac.id/86061/>
- Muhammad Iqbal. 2020. "Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Umkm." *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2204>
- Muhammad Rezza Kurniawan, dan Pujiyono. 2018. "Modus operandi korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh PNS." *Law Reform*, Vol. 14, No. 1. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20241>
- Muslihin Rais. 2017. "Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 6, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4870>
- Nabilla Yusniar Rachman. 2022. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos di Tengah Pandemi Covid-19." *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/33443/>

- Ninik Alfiah. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial Di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19." *Jurnal Education and Development*, Vol. 9, No. 2. DOI: 10.37081/ed.v9i2.2539
- Noni Noerkaisar. 2021. "Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, Vol. 2, No. 1. <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363>
- Permanasari, Novia. 2021. "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat NO. 10/PID. SUS-TPK/2021/PT DKI." *Syntax Idea*, Vol. 3, No. 9. <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/article/download/1486/902>
- Prastowo, R.B. Budi. 2006. "Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24, No. 3, hlm. 212-226. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1157>
- Ridwan, Hambali Thalib, dan Hardianto Djanggih. 2020. "Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa." *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 1, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.59>
- Sonny Ajie Herliandhy. 2016. "Kekuatan Politik: Peran Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam Mengungkap Korupsi Dana Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Banten Tahun 2011." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/123456789/40762/1/>